BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika politik Indonesia menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan kiai dalam kancah politik praktis merupakan kenyataan politik yang terjadi dari tingkat pusat hingga lokal. Dalam tingkat nasional, terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke empat Republik Indonesia, merupakan titik terang dari keterlibatan kiai dalam politik praktis. Di daerah, keterlibatan kiai dalam politik dapat diidentifikasi dari banyaknya kiai yang menjadi pengurus partai, terutama partai yang berasaskan agama, atau partai yang mengusung *spirit* keagamaan Islam. Umumnya, fenomena keterlibatan kiai dalam kancah politik di daerah dapat dijumpai dalam masyarakat dengan kultur tradisi keagamaan, tempat dimana kiai mendapatkan pengakuan dan keistimewaan dalam masyarakat.[1]

Salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bondowoso dua tahun silam merupakan bukti terjadinya demokrasi pada tingkat lokal. Pilkada juga merupakan sebuah arena demokrasi paling nyata yang dilakukan oleh penduduk Bondowoso. Dalam proses Pilkada terjadi pemilihan yang bebas, masyarakat juga berhak memilih pemimpin yang patut memimpin Bondowoso selama satu periode penuh. Dengan sistem *One Man*

[1] Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. (Yogyakarta: Sipress, 1994), hal.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

One Value partisipasi masyarakat juga sangat di perlukan untuk memajukan Bondowoso.

Bagi warga Bondowoso sendiri, Pilkada merupakan momentum yang benar-benar di tunggu untuk memilih seorang pemimpin yang dinilai mampu dan sanggup kemajuan bagi Bondowoso melalui proses yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah dan direvisi undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. [2]

Tetapi dalam pelaksanaannya, Pilkada yang seharusnya berjalan dengan demokratis itu tidak seharusnya di bayar mahal untuk pembelian suara dari masyarakat. Dengan sistem *One Man One Vote One Value* yang di terapkan di negara kita menjadikan para calon yang bersaing harus memobilisasi massa sebanyak mungkin. Tak urung lagi pergolakan politik yang terjadi tidak hanya pada calon yang bertanding memperebutkan jabatan melainkan melebar ke konflik antar kampung dan antar indivudu, dan dampaknya akan merusak hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan.

Tidak hanya masalah relasi sosial saja yang terjadi dalam Pilkada. Politik uang juga menjadi masalah yang sangat riskan dalam sebuah pemilihan kepala Daerah. Politik uang ini bukan hal yang baru di negara kita. Mulai dari

[2] Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pusat sampai lokal tidak akan pernah luput dari *Money Politik.* Karena uang memegang peran penting terutama dalam Pilkada.

Pemahaman politik yang kurang menjadi kendala utama yang di alami bangsa kita dalam menjalankan demokrasi yang seutuhnya. Akibatnya masyarakat buta akan politik dan seringkali tidak mengerti syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, sedangkan orang yang memiliki pengetahuan tentang itupun tidak menggunakan hati nuraninya dalam melakukan sebuah pilihan.

Kemiskinan yang sampai sekarang masih belum bisa di atasi oleh negara kita juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Akibat perekonomian yang kurang itu menyebabkan suara mereka mudah saja dibeli bahkan dengan harga yang murah. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya sebuah demokrasi harus diiringi dengan pendidikan politik dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi yang seperti ini arahan dari tokoh masyarakat sangat diperlukan, terutama tokoh agama dan kiai yang memang di anggap mampu untuk mengawal moral masyarakat awam. Tujuannya agar masyarakat benar-benar bisa memilih calon yang memiliki integritas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin.

Dalam konteks seperti ini, kiai yang berperan sebagai tokoh agama bertugas mengembalikan arah politik dari politik kekuasaan yang bersandar pada uang dan kapital semata-mata kepada politik kekuasaan yang bertunjang pada etika, moral, dan integritas. Secara umum dalam kasus ini masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang perlu disadarkan kepada penafsiran yang benar akan pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan kapabel harus lebih didahulukan dari pada pemimpin yang tidak jujur, berintegritas rendah dan melakukan politik uang.

Dalam suatu masyarakat, peran elite agama dan elite penguasa cukup signifikan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sebagai elit agama, kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dalam masyarakat yang memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk Bondowoso.[3]

Kiai, sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan; lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kiai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kiai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.[4] Semuanya itu membuktikan bahwa intensitas kepedulian kiai dalam politik ternyata masih ada.

---

[3] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa.* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cetakan Pertama (1). 1999), 12.

[4] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kiai* (Ringkasan Disertasi). (Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M, 1998), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Dirdjosanjoto menegaskan bahwa sejak semula kiai berada pada posisi mendua: di satu sisi ia adalah seorang tokoh agama, dan di sisi lain ia adalah tokoh politik.[5]

Peran kiai secara ideal adalah yang bersih dari politik praktis dan mengembalikan posisi sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengembalikan ulama sebagai pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya posisi kiai dimanfaatkan oleh elite politik.

Dalam moment-moment hajatan politik, kiai atau ulama memang seringkali dijadikan target "silaturahmi politik". Ini diantaranya karena kiai di anggap memiliki pengaruh dan kharisma di masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian para politisi, terutama saat Pilkada, karena dengan mendekat ke para kiai, berarti mereka sedang mendekat ke penarik suara masyarakat. Mereka beramai-ramai meminta restu dan doa dari sang kiai agar dapat dukungan dari jama'ah atau santri dan masyarakat yang selama ini ma'mum sama kiai. Begitu juga yang terjadi di Bondowoso menjelang pilkada dari calon sudah mulai menjalani silaturahmi politik kepada kiai yang dianggap memiliki power untuk menarik suara masyarakat.

Dari segi geografis Bondowoso bagian kota yang ada di Jawa Timur dengan diapit oleh dua kota antaranya Situbondo dan Jember. Disisi lain Bondowoso juga bagian dari daerah yang berbasis pesantren yang sering disebut daerah tapel kuda yang mana kiai untuk daerah tersebut masih menjadi

[5] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panutan masyarakat dengan konsep yang dianut bahwa kiai atau ulama adalah warisan Nabi. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai sangat tinggi sampai dalam hal mendidik anak dipercayakan sepenuhnya (pesantren).

Pada pertengahan tahun 2008 Bondowoso melakukan pesta demokrasi dengan empat kandidat calon diantaranya Drs. H. Amin Said Husni dan H.A. Haris Son Haji, dengan perolehan suara 143.951. Drs. KH. Salwa Arifin dan KH. Iman Thahir dengan perolehan suara 127.753. Drs. H.M. Misnan, MH dengan Drs. H. Sobri Wasil Gozhali M. Hum dengan perolehan 54.567. calon yang terakhir Irwan Bachtiar Rachmat, SE dan Drs. H. Huzaini Effendi dengan perolehan suara 72.324. Calon yang nomor urut pertama berangkat dari birokrasi yang dulunya pernah menjadi wakil rakyat pusat (DPR-RI) dan merupakan penduduk pendatang yang asalnya dari daerah Madura dan mempunyai istri yang orang Bondowoso. Calon nomor urut dua merupakan tokoh masyarakat atau kiai sebuah Pesantren Mambaul Ulum yang ada di kecamatan Wonosari. Sedangkan nomor urut tiga dan empat murni seorang politisi dari partai politik. Penghitungan dari kantor pemilihan umum Bondowoso menyatakan pasangan nomor urut satu yang memenangkan pesta demokrasi tersebut meskipun pemenangnya merupakan bukan representasi dari penduduk asli dari Bondowoso dan yang menjadi hal yang menarik dalam pilkada tersebut, diatas telah diuraikan terkait masalah kiai bahwasanya kiai mempunyai power untuk suara masyarakat setelah ada calon yang ikut kontestasi ternyata idealitas tidak sejalan dengan realitas, sedangkan secara idealitas komunikasi sesama kiai lebih mudah dibandingkan komunikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat biasa atau birokrasi karena secara kultur beliau ketemu disatu titik secara kultural dari hal tersebut lah penulis merasa tertarik untuk mengkaji kiai dalam kancah politik.

Semua ini membuktikan bahwa masih banyak aspek-aspek yang menarik untuk di kaji lebih lanjut. Hal ini juga yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Kajian ini mencoba untuk mencari jawaban makna politik kiai dalam pilkada kabupaten Bondowoso sebagai salah satu bentuk demokrasi pada masyarakat penduduk Bondowoso yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Makna Politik Kiai Dalam Pilkada Studi Kasus Kabupaten Bondowoso Tahun 2008".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa persoalan mendasar yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana makna politik kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008?
2. Bagaimana keterlibatan politik kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna politik kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami keterlibatan politik kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengkayaan dan pengembangan konsep, teori perspektif, obyek dalam disiplin ilmu politik, khususnya dengan politik dan kiai.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, konsideran bagi kiai maupun masyarakat terkait dengan konsekuensi kiai yang terlibat dalam politik praktis.

E. Defisini Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsep politik dan kiai sebagai berikut:

Konsep politik setidaknya ada lima persepektif yang berkembang dalam mendefinisikan politik yakni. Pertama persepektif klasik, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan kebaikan bersama. Kedua persepekfif kekuasaan, politik sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelengaraan Negara dan pemerintahan. Ketiga persepektif kekuasaan, politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempertahan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat presepektif kebijakan, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksaan kebijakan umum. Kelima presepektif pertahanan, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[6]

Sedangkan kiai adalah merupakan elemen penting dalam masyarakat dalam konteks agama atau kiai adalah orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang lebih dalam bidang agama. Hal ini identik pada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik (*kitab kuning*) kepada santrinya. Disisi yang lain gelar kiai juga disebut orang *alim.*[7]

Sedangkan menurut Endang Turmudi kiai dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam.[8]

F. Telaah Pustaka

Sebagai bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Suprayogo dalam ringkasan desertasi. 1998, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik*

---

[6] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta, 1992) hal 10
[7] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES,1982), hal 55
[8] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai (Ringkasan Disertasi). (Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M), menyebutkan Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kiai selalu terlibat dalam aktifitas politik. *Pertama,* bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi-sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun juga menyangkut persoalan politik. *Kedua*, dengan posisinya sebagai pemuka (elit) agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan Kiai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga,* dari sisi sejarahnya, kiai memiliki peran yang cukup besar dalam politik, yang hal itu bisa dilihat dalam pergolakan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan.

2. Abdurrahman Wahid. *Bunga Rampai Pesantren* CV. Dharma Bhakti Jakarta menyebutkan bahwa kiai memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menuju pengembangan yang lebih baik. Kiai tidaklah berkeinginan meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru mempelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ia sepenuhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan dalam proses perubahan sosial, justru karena ia *mafhum* bahwa perubahan tersebut merupakan *sunnatullah* yang tak terelakkan lagi.

3. Endang Turmudi. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* Yogyakarta: LkiS. Menyebutkan bahawa keberhasilan kiai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan kiai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakan aksi sosial. Oleh karena itu, kiai telah lama menjadi elite yang kuat.
4. Zamakhsyari Dhofier. 1982 *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai).* Jakarta: LP3ES. Berpendapat bahwa kiai berperan banyak dalam politik. Sejak semula kiai berada pada posisi mendua: di satu sisi ia adalah seorang tokoh agama, dan di sisi lain ia adalah tokoh politik.
5. Suherman ja'far, 2009 *Pasang Surut Kaum Sarungan,* Kanisius. Menurut penulis buku ini membahas pada sisi pasang surut dari keterlibatan peran kaum sarungan dalam kancah politik nasional Indonesia. Pembahasan buku ini bisa jadikan pelajaran yang berharga dan layak untuk jadi renungan sejarah bagi para kiai yang sudah terjun dalam politik dan mugkin akan terjun dalam politik praktis agar tidak terjebak dalam politik yang tidak sehat atau menyesatkan.
6. Achmad Patoni, 2007 *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik,* Pustaka pelajar. Buku ini membahas peran kiai pesanten dalam kancah era politik reformasi,pertama peran kiai membimbing dan menjadi panutan para santri kedua Kiai dalam aktivitas politik memperjuangkan kepentingan sebagai kemaslahatan umat melalui kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ibnu hajar, 2009 *Kiai Di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa.* IRCiSOd. Jogjakarta, buku ini membahas tentang banyaknya kiai yang hijrah kepolitik yang sehingga membuat masyarakat yang berada di pelosok desa tampaknya kesepian akan nasehat dan petuah penyejuk hati seorang kiai.
8. Sukamto. *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren.* LP3ES, Jakarta, 1999. Menurut penulis buku ini membahas kepemimpinan dan struktur kekuasaan kiai dari sudut pandang sosiologis yang arah perkembangannya sering ditentukan oleh perjalanan masyarakat dan sama sekali bukan dari pesantren.
9. Badaruddin, *Kepribadian Kiai Dalam Pondok Pesantren.* Jurnal Wacana vol v No 1 maret 2005 Jurnal ini membahas keseharian kepribadian kiai dengan santri, ustadz dan masyarakat.
10. Fahman, Mundzar. 2004. *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi.* JP Press: Surabaya. Keterlibatan Kiai dalam merespon para pelaku korupsi, juga merespon kiai yang terjerat korupsi.
11. Bahtiar Efendi. 2000. *Re-Politisasi: Pernahkan Islam berhenti berpolitik?. Mizan Bandung.* Keterlibatan kembali Islam dalam wilayah politik di mulai saat Orde Baru runtuh. Penulis mencoba membandingkan penyatuan Islam dan politik ketika Orde Lama,dengan penyatuan Islam dan Politik ketika pasca Orde Baru.
12. Abd. Latif Bustami. *Kiai politik , Politik Kiai.* Pustaka Bayan: Malang. Buku ini hasil penelitian kiai pesantren di kabupaten pasuruan, yang juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkap relasi kiai dengan kekuasaan, juga sindrom politik praktis yang membuat NU di tarik-tarik pada kepentingan tertentu.

13. Imam Suprayogo. 2007. *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai.* UIN Malang Press: Malang. Buku ini mendeskripsikan tentang persinggungan kiai dalam persoalan politik. Posisi kiai yang terlibat aktif dalam partai politik, sehingga membuat citra kiai sedikit menurun dalam pandangan para santri.

Dari telaah pustaka di atas penulis menganggap mempunyai celah pembahasan dengan judul "Makna Politik Kiai dalam Pilkada studi kasus pilkada kabupaten Bondowoso 2008" skripsi ini membahas bagaimana peran kiai terhadap politik dalam pilkada kabupaten bondowoso dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kiai.

G. Metode Penelitian

1. *Pendekatan dan jenis penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dikaji.[9]

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta 2000)hal. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.[10]

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Karena penelitian deskriptif kualitatif bersifat integral artinya bisa menangkap gejala-gejala secara utuh sehingga metode ini tepat untuk menggali data yang diharapkan oleh peneliti.
2. Dengan menggunakan menggunakan penelitian kulitatif ini kevaliditasannya data dapat diperoleh. Hal ini karena dalam metode tersebut ada teknik pemeriksaan keabsahan data.

2. *Sumber Data*

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dalam dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan

[10] Koentjaraningrat: Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tema penelitian. *Informan* penelitian merupakan orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data atau disebut juga yang diteliti, karena ia bukan saja yang sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak penelitian berdasar hasil informasi yang di berikan. Adapun tehnik penentuan *informan* menggunakan *Teknik Snowball Sampling* digunakan apabila peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, peneliti bisa secara langsung datang memasuki lokasi, dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya dimulai dari informasi kunci.

Berikut ini *informan-informan* yang menjadi sumber data yaitu: KH. Salwa Arifin, KH. Iman Thahir, KH. Sobri Wasil Ghozali, KH. Zainul Fauzan, KH. Sarif Hasah, KH. Abd. Qodir Syam, KH. Ubaidillah Nur, KH. Abdul Hakim, KH. Malik Sanusi, KH. Abdul Mu'iz, KH. Kurdi Sulaiman, KH. Munawir, KH. Nur Subairi, KH. Sa'rohilyas dan KH. Nur Hotib Tabroni.

Adapun data primer dalam penelitian berasal dari tokoh masyarakat (Kiai) sebagai *Informan.*

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerapan suatu teori.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder untuk menopang data primer maka buku yang digunakan sebagai berikut:

1) Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES
2) Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* Yogyakarta: LKiS
3) Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik,* Jogjakarta: Pustaka Pelajar
4) Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kiai* (Ringkasan Disertasi). Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M
5) Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* Yogyakarta: LKIS
6) Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta

3. ***Metode Pengumpulan Data***

a. *Wawancara*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau *informan* dengan mengunakan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara) untuk secara detail dan mendalam.

wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang memahami keadaan dan kondisi yang sedang diteliti. Hal ini di lakukan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. *Dokumentasi*

Domumentsi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang yang menjadi informan.[11] Dokumentasi di bagi menjadi dokumentasi pribadi dokumntasi resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau kekurangan seorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen jenis ini bisa berupa buku biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis bografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.

[11] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 216-217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Metode Analisa Data*

Metode analisa data yang digunakan adalah Metode analisa kualitatif Versi Matthew B. Miles & A. Michel Huberman sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasara yang di peoleh lapangan studi.

Kedua, Penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan menjadi pernyataan, penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif.

Ketiga, Verifikasi penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diprolehnya di lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar di peroleh konklusi yang valid dan kokoh.[12]

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibuat dengan sistematika per-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab yang mana satu dan yang lain memilki hubungan yang erat. Adapun struktur pebahasan tersebut sebagai berikut:

---

[12] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* (Jogdjakarta: 2006) hal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi konsep, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

Pada bab ini di uraikan tentang kerangka konseptual dan teori yang melandasi yaitu: konsep kiai, partisipasi politik, pilkada dan teori tindakan sosial Max Weber.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Pada bab ini akan dideskripsikan monografi Kabupaten Bondowoso baik dari aspek Geografis, Demografis, Sosial dan Agama, Pendidikan, ekonomi dan politik serta kiai dalam konteks masyarakat Bondowoso.

BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang keterlibatan kiai dalam pilkada dan makna politik kiai dalam pilkada.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id